



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
REPUBLIK RAKYAT CHINA  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN**

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri disebut "Pihak")

**BERKEINGINAN** memperkuat dan lebih mengembangkan hubungan persahabatan di antara kedua negara di bidang pendidikan;

**MENYADARI** pentingnya pendidikan sebagai faktor pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat untuk mempererat hubungan kedua negara;

**MEYAKINI** perlunya kerja sama yang efektif dan berlanjut sesuai dengan kepentingan kedua negara;

**MEMPERCAYAI** bahwa kerja sama tersebut akan sesuai dengan kepentingan bersama dan berkontribusi pada peningkatan pengembangan pendidikan di kedua negara;

**MEMPERHATIKAN** Rencana Aksi pelaksanaan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2010;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

**TELAH SEPAKAT** sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, selanjutnya disebut MSP, adalah untuk meningkatkan kerja sama pendidikan berdasarkan kemitraan, reciprocitas, dan keuntungan bersama, dan memajukan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Para Pihak harus mempertimbangkan program pendidikan berikut sebagai prioritas bidang kerja sama:
  - a. pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah kejuruan;
  - b. pendidikan tinggi, pasca-sarjana, dan pendidikan profesi.
  
- (2) Para Pihak harus mendukung dan memfasilitasi kerja sama di bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. pengembangan kontak langsung antara lembaga pendidikan Indonesia dan lembaga pendidikan China yang terkait,
  - b. pertukaran pengalaman dan kerja sama di bidang pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat pendidikan dasar dan menengah termasuk pertukaran tenaga pengajar di bidang tersebut,
  - c. pertukaran pengalaman positif tentang peningkatan kualitas pendidikan;
  - d. pertukaran pelajar/ mahasiswa, dosen, guru, dan tenaga kependidikan untuk belajar, mengikuti pelatihan, dan berbagi pengalaman;
  - e. setiap Pihak harus menyediakan sejumlah beasiswa untuk program Strata-1, pasca-sarjana, dan program penyegaran akademik di lembaga pendidikan tinggi di negara Pihak lain. Proses pencalonan dan pengaturan beasiswa ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing. Biaya perjalanan internasional ditanggung oleh Pihak pengirim;
  - f. pertukaran Informasi mengenai program pendidikan dan standar pendidikan setiap tingkat pendidikan di kedua negara;
  - g. penelitian bersama dan publikasi internasional;
  - h. diskusi tentang kemungkinan penyetaraan dokumen yang terkait dengan gelar akademik, kualifikasi dan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di kedua negara;
  - i. pertukaran informasi dan penyelenggaraan seminar, sistem pendidikan, peningkatan teknologi pengajaran, tugas dan metode mengajar di lembaga pendidikan di kedua negara;
  - j. keikutsertaan pelajar/ mahasiswa di dalam kompetisi internasional di bidang mata pelajaran pokok yang diselenggarakan oleh masing-masing negara;
  - k. pembelajaran dan pengajaran bahasa nasional masing-masing negara dan literatur pendidikan negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China;
  - l. pendirian Pusat Pengajaran Bahasa Mandarin (disebut juga "Pusat Bahasa Mandarin") di Indonesia termasuk di 6 universitas Indonesia yang terletak di Jakarta, Surabaya, Pontianak, Bandung, Makassar, dan Malang melalui pengaturan pelaksanaan yang dibutuhkan; dan
  - m. bidang dan program lain yang disepakati oleh Para Pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Kerja sama di dalam Memorandum Saling Pengertian Ini dapat dilaksanakan dengan pengaturan khusus yang disepakati oleh Para Pihak dari lembaga pendidikan dan tergantung pada ketersediaan dana.

2. Pada bidang pertukaran delegasi dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, pihak pengirim harus menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya lain di negara pihak penerima, kecuali secara khusus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
3. Biaya yang mencakup kegiatan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

#### **PASAL 4 KELOMPOK KERJA BERSAMA**

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Mekanisme Negosiasi Kementerian di dalam Kelompok Kerja Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China, untuk memfasilitasi, memonitor, dan mengkaji pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini secara rutin.
2. Kelompok Kerja Bersama wajib diketuai oleh Pejabat Senior Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat China, dengan mengikutsertakan instansi terkait jika sesuai, dan wajib bertemu setiap dua tahun sekali atau jika diperlukan, di Indonesia atau di China secara bergantian.

#### **PASAL 5 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

Para Pihak harus memastikan bahwa personil yang terlibat dengan kegiatan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini hanya melakukan kegiatan di bawah kerangka MSP ini dengan menghormati hukum nasional dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

#### **PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Pihak harus melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negara masing-masing.
2. Dalam hal pengaturan program khusus atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak harus menyusun pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

#### **PASAL 7 AMANDEMEN**

Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis perbaikan atau amandemen terhadap Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan Pihak lain. Perbaikan atau amandemen tersebut harus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau amandemen tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak.

**PASAL 8  
PENGHENTIAN SEMENTARA**

Setiap Pihak memiliki hak untuk memberhentikan sementara dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang harus berlaku seketika setelah pemberitahuan secara tertulis disampaikan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa yang timbul terkait penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara Para Pihak.

**PASAL 10  
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan kesepakatan bersama;
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 6 bulan sebelumnya;
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku pengaturan atau program yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan atau program tersebut.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah negara masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Guiyang pada tanggal 3 Agustus dua ribu sepuluh dalam Bahasa Indonesia, China, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Kementerian Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia

Untuk Kementerian Pendidikan  
Republik Rakyat Cina

**SIGNED**

**SIGNED**

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA  
Menteri Pendidikan Nasional

Mr. Yuan Guiren.....  
Menteri Pendidikan



## 印度尼西亚共和国国民教育部与中华人民共和国教育部 关于教育领域合作的谅解备忘录

印度尼西亚共和国国民教育部与中华人民共和国教育部（以下简称“双方”），本着加强并继续发展两国在教育领域友好关系的愿望，认识到教育在促进经济发展和进一步密切两国关系方面的重要意义，充分认识到为符合两国利益而开展的持久有效的合作有其重要性，相信这种持续有效的合作符合双方共同利益，并有利于促进两国教育的发展，根据2010年1月21日印尼、中国两国政府在雅加达签署的《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府关于实施战略伙伴关系联合宣言的行动计划》，在遵守双方各自现行国家法律法规的前提下，达成如下协议：

### 第一条 目 的

本谅解备忘录旨在以平等互利原则为基础发展双方在教育领域的合作，并促进双方交往与相互之间的理解。

### 第二条 合作领域

一、双方将优先考虑如下教育合作领域：

1. 初等教育、中等教育和中等职业教育；
2. 高等教育、研究生教育和专业教育。

二、双方鼓励并支持在如下领域进行合作：

1. 推进印尼教育机构与中国教育机构的直接联系；
2. 开展在初等教育阶段和中等教育阶段科技教学领域内的经验交流与合作，以及在该领域内的教学人员互换；
3. 开展在提高教育质量方面的有益经验交流；
4. 为学习、培训和分享经验而进行学生、教师、教职人员交换；
5. 双方每年向对方提供一定数量的奖学金名额，用于对方派遣本科生、硕士生、博士生和进修生到对方高等院校学习。奖学金申请办法和发放标准按照各自国家的有关规定办理。奖学金生的往返旅费由派遣方负担。
6. 交换双方在不同教育阶段的标准和教育项目的信息交换；
7. 联合研究和国际出版物；
8. 探讨相互承认两国教育机构颁发的与学历、学位、学分有关的证书的可能性；
9. 交换双方教育机构有关研讨会组织、教育体制、教学法技术改进、教学方法等方面的信息；
10. 两国学生参加对方国家举办的基础学科方面的国际竞赛；
11. 在两国开展对双方官方语言和教育文献的研究和教学。
12. 通过具体安排和操作在印尼雅加达、泗水、坤甸、万隆、锡江和玛琅的6所大学设立孔子学院；
13. 经双方书面同意的其它合作领域和学习项目。

### **第三条 实施**

一、该谅解备忘录框架下的合作通过缔约双方和教育机构安排实施，并受可使用的经费限制。

二、在该谅解备忘录框架下互换代表团，如无双方书面特别说明，则由派出方负担旅费、住宿费和在接待方国家所产生的其它费用。

三、本谅解备忘录中所涉及的合作活动经费将按双方商定的方式负担。

### **第四条 联合工作组**

一、双方同意建立部际磋商机制，即建立印度尼西亚共和国国民教育部和中华人民共和国教育部联合工作组，定期对本谅解备忘录的实施进行协助、监督和回顾。

二、联合工作组由印尼、中国两国教育部的高级官员共同管理，其它利益相关方适当参与。联合工作组会议每两年举行一次，印尼方和中方轮流举办。联合工作组还可视情增加额外会议。

### **第五条 人员行为限制**

在尊重和遵守各自国家法律法规的情况下，双方保证其人员在该谅解备忘录框架下的行为不带任何政治或商业色彩，避免进行任何与该谅解备忘录的目标不一致的行为。

## **第六条 知识产权保护**

1. 任何一方应该在遵守各自现行国家法律法规的前提下保护另一方的知识产权；
2. 若任何项目涉及到知识产权问题，双方应根据各自国内法律进行具体安排和处理。

## **第七条 修 订**

任何一方可书面通知另一方对本谅解备忘录进行修订。经双方同意的书面修改意见将成为本谅解备忘录的一部分。经双方同意的书面修改意见自双方约定之日起生效。

## **第八条 中 止**

一方有权因国家安全、公共秩序、公共健康的原因暂时中止执行本谅解备忘录的全部或部分条款，中止行为自一方通过外交途径书面告知另一方时即刻生效。

## **第九条 争议的解决**

如双方对本谅解备忘录条款的解释出现分歧或争议，应由双方采取友好协商的方式解决。

## **第十条 有效期和终止**

- 一、本谅解备忘录自签字之日起生效。
- 二、本谅解备忘录有效期 5 年，有效期满后，经双方同意可自动再延长 5 年。



三、任何一方有权在有效期满前至少 6 个月通过外交途径以书面形式通知对方终止本谅解备忘录。

四、本谅解备忘录中所规定的双方尚未执行完毕的项目不因本谅解备忘录的提前终止而受到影响。

以下签署人由各自政府授权签署本谅解备忘录。

本谅解备忘录于 2010 年 8 月 3 日在贵阳签订，一式三份，分别用印尼文、中文和英文写成，三种文本同等作准。如对文本的解释发生分歧，以英文文本为准。

印度尼西亚共和国  
国民教育部代表

**SIGNED**

---

中华人民共和国  
教育部代表

**SIGNED**

---



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE MINISTRY OF EDUCATION  
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
ON  
COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION**

The Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the People's Republic of China (hereinafter referred to collectively as the "Parties" or singularly as "the Party")

**DESIRING** to strengthen and further develop the friendly relations between the two countries in the field of education;

**RECOGNIZING** the importance of education as a factor of economic development as well as a means to further cultivate the ties between both countries;

**CONVINCED** of the necessity of a lasting and effective cooperation in the interest of both countries;

**BELIEVING** that such cooperation would serve the common interests and contribute to the enhancement of the field of education development of both countries;

**TAKING INTO ACCOUNT** to Plan of Action for the implementation of the Joint Declaration on Strategic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China signed in Jakarta on 21 January 2010;

**PURSUANT TO** the prevailing laws and regulations of the respective countries;

**HAVE AGREED** as follows:

**ARTICLE 1  
OBJECTIVES**

The objectives of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", are to develop educational cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.

**ARTICLE 2**  
**AREAS OF COOPERATION**

- (1) The Parties shall consider the following educational programs as priority spheres of cooperation:
  - a) Primary education, secondary education and secondary vocational education;
  - b) Higher education, post-graduate and professional education.
  
- (2) The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas:
  - a) The development of direct contacts between the Indonesian and Chinese educational institutions concerned;
  - b) The exchange of experience and cooperation in the spheres of teaching of science and technology at the primary and secondary educational level as well as exchanges of personnel to conduct teaching in this field;
  - c) The exchange of positive experiences on improving quality of education;
  - d) the exchange of students, lecturers, teachers, and educational staff for learning, training, and sharing experiences.
  - e) Each Party shall provide the other Party with a certain number of scholarships for undergraduate, postgraduate and refresher programmes in institutions of higher learning in the other Party's country. The application and the terms of the scholarships shall be determined in accordance with the relevant regulations of each country. The international travel expenses shall be covered by the sending Party.
  - f) The exchange of information about the educational programs and educational standards of all levels of education in both countries;
  - g) Joint research and international publications;
  - h) The discussion of the possibility of mutual recognition of documents related to academic degrees, qualification and accreditation, issued by the educational institutions of both countries;
  - i) The exchange of information and the organization of seminars, educational systems, improvement of pedagogical technologies, teaching and methodological work in the educational institutions of both countries;
  - j) The participation of students in international contests on basic subjects organized by each country;
  - k) The studying and teaching of the national languages of the respective countries and literature of education of the People's Republic of China and the Republic of Indonesia;
  - l) The establishment of Chinese Language Teaching Centers (the so-called "Pusat Bahasa Mandarin") in Indonesia including in six Indonesian universities located in Jakarta, Surabaya, Pontianak, Bandung, Makassar and Malang through implementing arrangement as appropriate; and
  - m) Other areas and study programs as mutually agreed upon by the Parties.

**ARTICLE 3**  
**IMPLEMENTATION**

1. The cooperation under this Memorandum of Understanding may be implemented by specific arrangements concluded by the Parties and educational institutions and subject to the availability of fund.

2. In the course of exchange of delegations within the framework of this MoU, the sending side shall bear the travel expenses, accommodation and other expenses of the delegation in the country of the receiving side, unless specifically agreed upon by the Parties in writing.
3. The expenses covering cooperative activities within the framework of this MoU shall be borne as may be mutually agreed by the Parties.

#### **ARTICLE 4 JOINT WORKING GROUP**

1. The Parties agree to establish the Ministries Negotiation Mechanism in a Joint Working Group between the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the People's Republic of China, to facilitate, monitor, and review the implementation of this MoU regularly.
2. The Joint Working Group shall be co-chaired by the Senior Officials of the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the People's Republic of China, with participation of other interested agencies as appropriate, and shall meet biennially or when required, in Indonesia or in China alternately.

#### **ARTICLE 5 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES**

The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding shall engage only in activities under the framework of this MoU with respect to the national laws and regulations of the respective countries.

#### **ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Each party shall protect, within its territory, intellectual property rights of other party in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
2. In case of specific arrangement programs or projects that may result in intellectual property, the parties shall include separate arrangement in accordance with their respective regulations.

#### **ARTICLE 7 AMENDMENT**

Either Party may request in writing a revision or an amendment to this Memorandum of Understanding by notifying the other Party. Any revision or amendment shall be agreed upon by the Parties in writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Such revision or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties.

**ARTICLE 8  
SUSPENSION**

Each Party reserves the rights to suspend temporarily for the reasons of national security, public order, and public health, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which shall take effect immediately after a written notification has been given to the other Party through a diplomatic channel.

**ARTICLE 9  
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute arising out concerning the interpretation of this MoU shall be settled amicably through consultation between the Parties.

**ARTICLE 10  
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing;
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years and may be extended for the same period upon mutual agreement;
3. Either Party may wish to terminate this MoU by giving a written notice six (6) months in advance.
4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going arrangements or programs made under this MoU until the completion of such arrangements or programs.

IN WITNESS whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU.

DONE in duplicate at Guiyang on the day of August 3rd, in the year two thousand and ten in Indonesian, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Ministry of National Education  
of the Republic of Indonesia**

**For the Ministry of Education  
of the People's Republic of China**

**SIGNED**

**SIGNED**

**Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA  
Minister of National Education**

**Mr. Yuan Guicun.....  
Minister of Education**